

**LEGALITAS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
(Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh)**

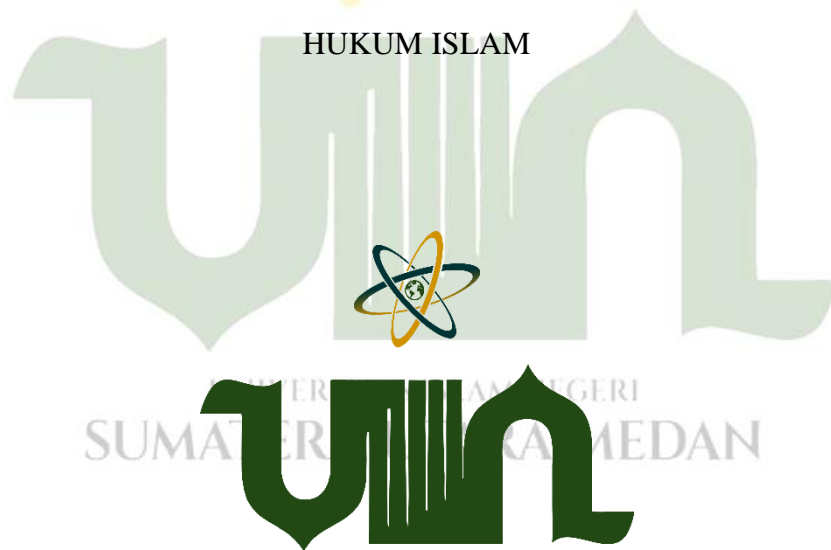
DISERTASI

Oleh:

Azwir

NIM. 4001183004/ S-3 HUKI

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

**LEGALITAS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
(Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh)**

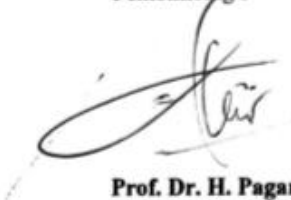
Oleh

**Azwir
NIM. 4001183004/HUKI**

Dapat Disetujui dan Disahkan untuk Diajukan pada Ujian Terbuka
Memperoleh Gelar Doktor (S-3) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
UIN Sumatera Utara
Medan

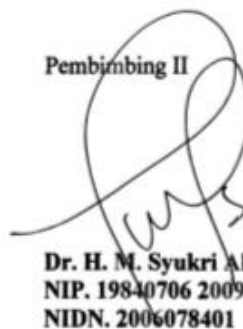
Medan, 27 September 2022

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag
NIP. 19581231 198803 1 016
NIDN. 2031125810**

Pembimbing II



**Dr. H. M. Syukri Albani Nst, MA
NIP. 19840706 200912 1 006
NIDN. 2006078401**


PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul: "**Legalitas Talak di Luar Pengadilan (Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh)**" atas Nama: **Azwir**, NIM. 4001183004 Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Selasa, tanggal 13 September 2022.


Disertasi ini telah diperbaiki sesuai dengan masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk Sidang Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 13 September 2022
Panitia Ujian Tertutup Disertasi
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

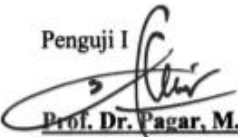

Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 196208141992031003
NIDN. 2014086201

Sekretaris


Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 196704231994031004
NIDN. 2023046703

Anggota


Penguji I


Prof. Dr. Fagar, M.Ag
NIP. 195812311988031016
NIDN. 2031125810


Penguji II


Dr. M. Svukri Albani Nst, MA
NIP. 198407062009121006
NIDN. 2006078401

Penguji III


Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015
NIDN. 2003037702

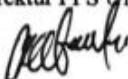
Penguji IV


Dr. Dhiauddin Tanjung, MA
NIP. 197910202009011010
NIDN. 2020107903

Penguji V


Dr. Watni Marpaung, MA
NIP. 198205152009121007
NIDN. 2015058201

Mengetahui
Direktur PPS UIN SU


Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 1962081419921003
NIDN. 2014086201

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azwir

NIM : 4001183004

Tempat, Tgl. Lahir : Peulalu, 14 Maret 1983

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jl. Yusuf Hasyim Komplek Perumahan Sawo Giri Indah Lr. 1 No. 15, Desa
Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh

Dengan sebenarnya bahwa disertasi Yang Berjudul "**Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan (Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh)**" adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, shalawat dan salam penulis haturkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW, dengan memohon hidayahNya penulis telah menyusun Disertasi untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan judul *Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan (Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh)*, penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan dengan itu penulis sangat mengharapkan kritikan untuk kesempurnaan tersebut sehingga Disertasi ini bisa memberikan mamanafaat kepada para akademisi dalam melakukan kajian lanjutan berkaitan dengan judul yang sudah penulis tulis ini dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada isteri tercinta Maulida Yani, S.Pd.I dan anak-anak tersayang Muhammad Aqil Azzaky, Almira Zakia, Mutiatus Saadah, dan Muhammad Raffan Nashif yang dengan penuh kesabaran, pengertian dan dukungan mereka berikan kepada penulis dalam menempuh pendidikan, selanjutnya juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta dan kepada kedua mertua penulis yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian pendidikan penulis dari awal perndidikan sampai dengan akhir.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Pengelola Program 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa Dosen S3 On Going angkatan 2018 kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan S-3
2. Dr. Basri, MA selaku Rektor IAIN Langsa yang sudah memberikan Rekomendasi dan izin dalam melanjutkan pendidikan
3. Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
4. Civitas Akademika IAIN Langsa yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menempuh pendidikan
5. Rektor dan seluruh Civitas Akademika UIN Sumatera Utara Medan
6. Prof. Dr. Hasan Bakti Nst, MA selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara
7. Dr. Phil. Zainul Fuad, MA selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara
8. Dr. Dhiauddin Tanjung, MA selaku Ka. Prodi dan Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum selaku Sek. Prodi S-3 Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

9. Prof. Dr. Pagar, M.Ag, Dosen dan juga sebagai Pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan disertasi ini
10. Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA selaku Pembimbing II dengan berbagai kesibukan beliau sudah menyempatkan diri untuk membimbing penulis
11. Para Dosen dan Staf pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan
12. Teman-teman Program Doktor Hukum Islam angkatan 2018 pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan
13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah sangat banyak memberikan bantuan dalam proses penyelesaian penulisan Disertasi ini, semoga Allah selalu melimpahkan hiadayahnya atas semua kebaikan tersebut yang tidak dapat penulis balas.

Pada akhir kata harapan penulis Disertasi ini bisa berguna bagi diri penulis sendiri, agama, nusa dan bangsa. Amin

Medan, September
2022
Penulis

Azwir
NIM. 4001183004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	vi
ABSTRAK BAHASA ARAB.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN LITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Batasan Istilah dan Kerangka Teoritis.....	19
1. Batasan Istilah.....	19
2. Kerangka Teoritis.....	25
F. Kajian Terdahulu.....	38
G. Metode Penelitian.....	43
1. Lokasi Penelitian.....	43
2. Jenis Penelitian.....	45
3. Sumber Data.....	48
4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
5. Teknik Pengolahan dan Analisis data.....	52
H. Sistematika Penulisan.....	54
BAB II : LANDASAN TEORI.....	55
A. Tinjauan Umum Perkawinan dan Perceraian.....	55
1. Pengertian Perkawinan.....	55
2. Urgensi Perkawinan.....	57
3. Batas Usia Perkawinan.....	61
4. Perceraian.....	66
B. Asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan.....	74
C. Teori Mashlahah Dalam Perceraian.....	77
D. Teori Kepastian Hukum Dalam Perceraian.....	82
BAB III : PRAKTEK PERCERAIAN DI ACEH.....	90
A. Ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan dan KHI tentang Perceraian.....	90
B. Ketentuan Undang-undang tentang Perceraian.....	102
C. Bentuk-bentuk dan Alasan Perceraian.....	105

1. Bentuk-bentuk Perceraian	105
2. Alasan Perceraian.....	117
D. Ikrar Talak dan Proses Berlakunya Perceraian	123
1. Ikrar Talak.....	123
2. Berlakunya Ikrar Talak.....	126
E. Persaksian, Pelaksanaan Talak dan Perceraian	143
BAB IV : LEGALITAS PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR PENGADILAN DI ACEH	166
A. Ketentuan Fikih tentang Talak	166
1. Pengertian Talak dalam Hukum Islam	166
2. Talak Menurut Al-Qur'an dan Hadis	167
3. Rukun dan Syarat Talak	170
4. Persaksian dalam Talak	175
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Perceraian di Aceh.....	180
a) Cerai Talak	183
b) Cerai Gugat	186
C. Pelaksanaan Perceraian di Pengadilan dan di Luar Pengadilan pada Masyarakat Aceh	188
D. Legalitas Perceraian yang dilakukan di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Aceh.....	191
E. Kedudukan Hukum Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Aceh .	204
BAB V : PENUTUP	224
A. Kesimpulan	224
B. Saran-saran.....	225
Daftar Kepustakaan.....	227
Lampiran	241
Daftar Riwayat Hidup	250

ABSTRAK



Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan (Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh)

Nama : Azwir
NIM : 4001183004
Program Studi : Hukum Islam
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Timur / 14-03-1983
Nama Orang Tua : Ayah: Tgk. Ismail Djuned
Ibu: Rosdiana Hasballah
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Pagar, M.Ag
2. Dr. Muhammad Syukri Albani Nst,
MA

Perceraian bagi masyarakat aceh tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam, kekuatan hukum Islam lebih mendominasi dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan agama, hukum Islam bagi masyarakat Aceh dipahami berupa hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Dalam permasalahan perceraian, ketika terjadi perbedaan konsep hukum antara Islam dan hukum Negara, maka hukum Islam menjadi pilihan utama dalam penyelesaian masalah. Tidak hanya itu saja, hukum adat memiliki peran penting dalam tatanan hukum masyarakat Aceh, namun hukum adat di Aceh sudah mengalami asimilasi dengan hukum Islam sebagaimana yang dipertegas dalam hadih maja "*hukom ngen adat lagee zat ngen sifeut*" (hukum dan adat bagaikan zat dan sifat) yang bisa dimaknakan bahwa antara hukum adat dengan hukum agama adalah dua hal yang sulit dipisahkan, penyatuan dua hal yang berbeda ini menjadi pegangan bagi masyarakat aceh dalam menjalankan kehidupan dan keberagamaan termasuk dalam urusan perceraian. Permasalahan perceraian di Aceh terjadi ketika perbedaan pemahaman hukum terkait dengan perceraian diluar dan di depan pengadilan. Permasalahan lainnya juga muncul dengan dikeluarkannya fatwa MPU Aceh pada tahun 2015 dengan posisi memperkuat kedudukan fiqh dalam masalah perceraian di luar pengadilan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan tentang penyelesaian kasus perceraian. hukum Negara menghendaki perceraian di depan pengadilan, sedangkan dalam kontek fikih yang dianut oleh masyarakat Aceh tidak ada keharusan perceraian di depan pengadilan, yang terpenting adalah kesesuaian dengan hukum fiqh. Berangkat dari permasalahan perceraian di Aceh, maka tulisan ini berupaya untuk menganalisis lebih jauh lagi tentang problematika perceraian yang terjadi di Aceh. Rumusan masalah yang dikaji dalam disertasi ini yaitu; 1). Bagaimana legalitas perceraian di pengadilan dan di luar pengadilan di Aceh ?. 2). Bagaimana pelaksanaan perceraian yang terjadi di Aceh dan 3). Bagaimana kedudukan hukum perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang legalitas perceraian bagi masyarakat Aceh. Selain itu, Disertasi ini juga akan menganalisis kecenderungan hukum yang digunakan oleh masyarakat Aceh dalam perkara perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum, sumber data primer berupa wawancara, penelitian ini juga menelaah tulisan-tulisan yang

berkaitan dengan perceraian di luar Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memahami legalitas hukum dalam kasus perceraian, masyarakat Aceh terbagi menjadi tiga kelompok; *Pertama*, masyarakat tradisional (adat); *Kedua*, masyarakat modern; *Ketiga*, masyarakat Neomodern. Bagi masyarakat tradisional yang sangat kuat dengan nuansa hukum fikih bermazhab Syafi'i menganggap bahwa perceraian sah dan legal ketika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam kitab fiqh, pengadilan tidak menjadi suatu pertimbangan penting dalam memutuskan perceraian. Masyarakat modern dalam hal ini yaitu masyarakat urban menyadari bahwa hukum Negara menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus perceraian, karena perceraian di depan pengadilan merupakan amanat undang-undang perkawinan yang memiliki legalitas hukum, sehingga perceraian di depan pengadilan menjadi suatu keharusan untuk menjamin hak dan kejelasan status perceraian. Sedangkan masyarakat neomodern menyadari bahwa hukum Negara dan agama tidak dapat dipisahkan, sehingga bagi mereka perceraian harus dilakukan dengan dua ketentuan hukum yaitu hukum agama dan Negara. Bagi masyarakat neomodern melihat bahwa perceraian secara agama sebagai bentuk legalitas secara agama dan sosial, sedangkan perceraian di depan pengadilan sebagai bentuk legalitas secara Negara. Permasalahan perceraian di luar pengadilan sebenarnya dapat dilakukan dengan upaya hukum berupa *isbat talak*, meskipun ketentuan *isbat talak* tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Hakim sebagai penegak keadilan dapat melakukan penafsiran hukum dan analogi hukum (*Argumentum per Analogiam*) dalam upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*). Analogi hukum dalam perkara *isbat talak* dapat dilakukan dengan cara menganalogikan dengan perkara *isbat nikah*, dengan menggunakan metode penafsiran dan analogi hukum, maka *isbat talak* dapat saja dilakukan oleh Hakim dalam menyelesaikan perceraian yang terjadi di luar pengadilan, hal ini juga berfungsi untuk menghindari kekosongan hukum tentang perkara perceraian yang terjadi di luar pengadilan. Selain itu, dengan adanya *isbat talak* maka kehadiran Negara untuk menjamin rasa keadilan bagi istri dan anak-anak dari perceraian di luar pengadilan di Aceh dapat terpenuhi.

Kata Kunci: *Perceraian, Legalitas, fiqh, Pengadilan Agama, Isbat Talak*

ABSTRACT



The Legality of Out-of-Court Divorce (An Analysis of Divorce in Acehese Society)

Name : Azwir
NIM : 4001183004
Study Program : Islamic Law
Place / Date of Birth : Aceh Timur / 14-03-1983
Parent's Name : Father: Tgk. Ismail Djuned
Mother: Rosdiana Hasballah
Supervisor (s) : 1. Prof. Dr. Pagar, M.Ag
2. Dr. Muhammad Syukri Albani Nst,
MA

Divorce for the people of Aceh is inseparable from the provisions of Islamic law; the power of Islamic law dominates in every legal decision related to religion, Islamic law for the people of Aceh is understood in the form of laws contained in the fiqh books of the *Madzhab* (school) of Shafi'i. In the issue of divorce, when there is a difference in the concept of law between Islam and State law, Islamic law becomes the primary choice in solving the problem. In addition, customary law has an essential role in the legal order among the Acehese people. It has undergone assimilation with Islamic law, described in the hadith maja "*hukom ngen adat lagee zat ngen sifeut*" (law and customs like substances and properties). Further, it can be interpreted that customary and religious law are two things and difficult to separate. For the people of Aceh, the combination of these two disparate things has become a means of navigating life and religion, including divorce issues. The problem of divorce in Aceh occurs when differences in legal understanding relate to divorce outside and before the courts. In 2015, another problem appeared from the issuance of MPU Aceh about strengthening the role of fiqh in divorce issues outside the court. This condition ultimately raises problems in resolving divorce cases. State law requires divorce before the court, while in the context of jurisprudence adopted by the people of Aceh there is no necessity for divorce before the court, the most essential thing is conformity with the *fiqh* law. Departing from the problem of divorce in Aceh, this paper seeks to analyze further the issues of divorce in Aceh. The formulation of the problems studied in this dissertation are; 1). What is the legality of divorce in court and outside Aceh? 2). How does divorce implementation occur in Aceh 3). What is the legal position of divorce outside the court in Acehese society. This study aims to analyze the legality of divorce for the people of Aceh. In addition, this dissertation will also examine the legal tendencies used by the people of Aceh in divorce cases. This research is an empirical juridical research with a statutory approach and legal sociology, a primary data source in the form of interviews, this research also examines writings related to divorce outside the court. The results showed that in understanding the law's legality in divorce cases, the people of Aceh are divided into three groups: traditional (indigenous) communities; Second, modern society; Third, Neo-modern society. For a powerful traditional society with legal nuances of *fiqh* the Shafi'I sect considers that divorce is permitted and legal

when it meets the elements set out in the book of *fiqh*; the court is not an essential consideration in deciding divorce. Modern society, in this case, namely urban society, realizes that State law is the primary choice in resolving divorce cases. Because divorce in front of the court is a mandate of marriage law that has legality, divorce becomes necessary to guarantee the rights and clarity of divorce status. Meanwhile, neomodern society realizes that State law and religion are inseparable, so divorce must be carried out with two legal provisions: religious law and the State. Neomodern societies see divorce religiously and socially as a form of legality, while divorce before the court is a form of legitimacy in the State. The issue of divorce outside the court can actually be done with legal remedies in the form of *isbat talak*. However, the marriage law does not regulate the provisions of *isbat talak*. Judges, enforcers of justice, can carry out legal interpretations and analogies (*Argumentum per Analogiam*) in legal discovery efforts (*rechtsvinding*). Legal analogy in *isbat talak* cases can be done by analogous to marriage *isbat* cases, using the method of interpretation and legal analogy. *Isbat talak* can be done by the judge in resolving divorces that occur outside the court, this also serves to avoid legal vacuums about divorce cases that occur outside the court. Finally, *isbat talak* among Acehnese people will help the State ensure a sense of justice for wives and children from divorce outside the court.

Keywords: Divorce, Legality, *fiqh*, Religious Court, *Isbat Talak*



ملخص البحث

شرعية الطلاق خارج المحكمة (دراسة تحليلية عن الطلاق في مجتمع أتشيه)

الاسم	: أزوير
رقم الطالب	: 4001183004
برنامج الدراسة	: الشريعة الإسلامية
مكان وتاريخ الميلاد	: بولالو / 14-03-1983
الاسم	: الأب : إسماعيل الأم : روسديانا
مشرف	: 1 : أ.د. فاغار المجستير
	: 2 : دكتور محمد شكري الباني لمجستير



الطلاق في مجتمع أتشيه لا ينفصل عن أحكام الشريعة الإسلامية حيث تسود الشريعة الإسلامية في كل قرار قانوني يتعلق بقضايا الديني لدى هذا المجتمع، وتفهم مجتمع أتشيه أحكام الشريعة في شكل الأحكام المنصوص في كتب الفقهية على مذهب الإمام الشافعي. عندما حدث اختلاف في المفاهيم بين الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المطبق، تصبح الشريعة الإسلامية هي الخيار الرئيسي في حل المشكلة، ليس ذلك فحسب بل العرف والتقاليد له دور هام في نظام القانوني لمجتمع أتشيه وتشهد هذا المجتمع اندماجا وتكيفا بين القانون العرفي مع الشريعة الإسلامية كما عبر عنها فلسفة الشعبية بعبارة أن الأحكام الشريعة والتقاليد مثل الذات والصفة في علم التوحيد التي يمكن تفسيرها بأن بين القانون العرفي و الأحكام الشريعة شئنان يصعب الفصل بينهما، فإن توحيد هذين الأمرين هو دليل لمجتمع أتشيه في حل قضايا حياتهم بما في ذلك الطلاق. تحدثت مشاكل الطلاق في أتشيه عند اختلاف فهمهم لأحكام التي تتعلق بالطلاق سواء كان خارج او داخل المحكمة. مشكلة أخرى ظهرت بموجب إصدار فتوى من مجلس الاستشارى للعلماء الاشى عام 2015 لتعزيز مكانة الفقه في قضايا الطلاق خارج المحكمة التي يثير مشاكل فيما يتعلق بتسوية قضايا الطلاق من حيث يشترط القانون ان يكون الطلاق أمام المحكمة بينما في سياق الفقه المعتمد من قبل أهل أتشيه لا يشترط أن يتم الطلاق أمام المحكمة، وأهم الشيء ان يكون الطلاق وفقا لأحكام المنصوص في كتب الفقه. انطلاقا من مشكلة قضايا الطلاق في أتشيه، تسعى هذه الدراسة إلى مزيد من التحليل لمشاكل الطلاق التي حدثت في أتشيه. صياغة مشكلة البحث التي ستتم دراستها في هذه الرسالة هي: (1). كيف هيكن شرعية الطلاق داخل المحكمة وخارجها في أتشيه؟ (2). كيف يتم تنفيذ الطلاق في أتشيه و (3). ما هو الموقف الشرعي للطلاق خارج المحكمة عند مجتمع أتشيه. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل شرعية الطلاق عند مجتمع أتشيه. بالإضافة إلى ذلك، ستحلل هذه الرسالة أيضا الاتجاهات القانونية التي يتبناها مجتمع أتشيه في قضايا الطلاق. هذا البحث يعتبر بحث قانوني تجريبي على نهج القانوني وعلم الاجتماع القانوني، وتأتي البيانات الأساسية من المقابلات و البحوث المتعلقة بالطلاق خارج المحكمة.

تظهر نتائج البحث أنه في فهم شرعية الطلاق ، ينقسم مجتمع أنثويه إلى ثلاث مجموعات ؛ الأول ، ما يسمى بالمجتمع التقليدي (العرفي) ؛ الثاني المجتمع الحديث. الثالث المجتمع شبه الحديث (نيو مودرن). بالنسبة للتقليديين المتمسكين بفقهاء الشافعي، تعتبر أن الطلاق صحيح وقانوني إذا استوفى بأركانه المنصوص في كتب الفقه، فإن المحكمة ليست عنصرًا مهمًا في فصل قضايا الطلاق عندهم. بالنسبة للمجتمع الحديث التي يمثلها المجتمع الحضري، يعتبر قانون احوال الشخصية المطبق هو الخيار الرئيسي في حل قضايا الطلاق، لأن الطلاق أمام المحكمة من موجبات القانون الاحوال الشخصية الذي له شرعية قانونية بحيث يكون الطلاق أمام المحكمة أمرًا ضروريًا لضمان الحقوق ووضوح حالة الطلاق. وفي الوقت نفسه ، يدرك المجتمع شبه الحديث أن الطلاق على وفق الديني هو شكل من أشكال الشرعية الدينية والاجتماعية، في حين أن الطلاق أمام المحكمة هو شكل من أشكال شرعية الدولة في امر الطلاق. قضايا الطلاق خارج المحكمة يمكن حلها عن طريق محاولة القانونية في شكل إثبات الطلاق، على الرغم من أن إثبات الطلاق لم ينظمها قانون احوال الشخصية يمكن للقضاة بصفتهم كصاحب القرار لاقامة العدالة ان تقوم باجراءالتفسيرات القانونية والقياس القانوني (Argumentum per Analogiam) في السعي وراء الاكتشاف القانوني (rechtsvinding)القياس القانوني في قضية اثبات الطلاق عن طريق القياس لاثبات الطلاق على قضية اثبات الزواج ، باستخدام طريقة التفسير والقياس القانوني يمكن للقضاة اجراء اثبات الطلاق في حل حالات الطلاق خارج المحكمة ، وهذا أيضًا لتفادي الفراغ القانوني فيما يتعلق بقضايا الطلاق خارج المحكمة. بالإضافة إلى

ذلك، ان اثبات الطلاق تاكد من حضور دور الدولة لضمان العدالة للزوجات والأطفال من الطلاق خارج المحكمة في أنثويه.